DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2024—2025
SELASA, 21 JANUARI 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI; dan**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025 .

Selamat datang bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya. Semoga selama masa reses, seluruh anggota DPR RI dapat memanfaatkannya secara optimal untuk menjaring aspirasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti melalui berbagai fungsi DPR RI pada masa persidangan ini.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2024 kepada yang merayakan; dan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia, semoga pada tahun 2025 ini, kita semua dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan untuk kita semua.

DPR RI memberikan apresiasi kepada aparat keamanan dan seluruh pihak yang terkait, sehingga perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif, serta riang gembira.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Masa persidangan ini akan bersamaan dengan Pelaksanan tahun pertama Program Pemerintahan Presiden Prabowo; Sebagaimana lazimnya, Pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya; Rakyat selalu memiliki harapan baru dari setiap pergantian pemerintahan; Begitu juga harapan rakyat kepada DPR RI Periode yang baru; Rakyat menitipkan kedaulatannya agar dapat dilaksanakan untuk mensejahterahkan hidup rakyat.

Setiap Pemerintahan juga akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia di segala bidang; Membangun Indonesia yang besar ini, tentulah membutuhkan kerja besar dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa.

DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan menjadi mitra kerja Pemerintah, dan DPR RI akan memastikan berbagai upaya Pemerintah, dalam membangun Indonesia, dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, selaras dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melalui Alat Kelengkapan DPR RI dan Mitra Kerja Pemerintah, untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia, maka di setiap upaya,
kebijakan dan program, kita harus memiliki arah yang sama yaitu mengutamakan kepentingan rakyat; rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat paling besar dari seluruh

kebijakan dan program pembangunan nasional; sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan/atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Memasuki Masa Awal Persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, maka sejumlah agenda legislasi DPR RI akan dilaksanakan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu terdapat 41 (*empat puluh satu*) RUU Prioritas Tahun 2025, dan 6 (*enam*) di antaranya merupakan Rancangan Undang Undang *carry over* dari DPR RI periode sebelumnya.

Oleh karena itu, pada masa persidangan ini, setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan Undang Undang, sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Komitmen untuk mencapai target Prolegnas, merupakan komitmen dan kinerja bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam membentuk Undang Undang.

Tahun Anggaran 2025, merupakan tahun pertama APBN Pemerintahan Presiden Prabowo; Terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian Kementerian/Lembaga Pemerintah, Program-program Pemerintah serta kebijakan fiskal lainnya; yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga Program Pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat; pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar

terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya; DPR RI juga akan mencermati dan menindak lanjuti sesuai fungsinya, agar Program Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi resiko, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Setiap Program Pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip *good governance* dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi global yang masih berlanjut, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal; Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif; Belanja Pemerintah harus semakin efektif dan efisien; Upaya dan Kebijakan untuk menarik investasi, membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik;

DPR RI, melalui AKD terkait, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindak lanjuti bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI dan Pemerintah, harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat; Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan Regulasi, Aparatur Sipil Negara, Anggaran, dan Program Kementerian/Lembaga.

Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat.

Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan program makan bergizi gratis;
2. penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan;
3. perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat;
4. penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah;
5. stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan;
6. upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan;
7. penanganan kasus virus HMPV;

8. penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah;
9. penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K);
10. konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah;
11. rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri;
12. penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri;
13. penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak;
14. rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026;
15. upaya mewujudkan swasembada energi;

16. meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur; dan
17. bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.

Pada masa reses Persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji.

Fungsi diplomasi DPR RI akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerja sama antarparlemen. Sejumlah agenda diplomasi DPR RI, antara lain sidang:

1. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD);
2. Open Government Partnership;
3. Security Conference;
4. World Trade Organization (WTO); dan
5. Inter-Parliamentary Union (IPU)

Pada masa sidang ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara, antara lain delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, serta Swedia.

Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Konferensi Parliamentary Union of the OIC (PUIC) ke-19.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan pada Masa Persidangan II. Rakyat Indonesia, dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa Persidangan II; Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025.

Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan "**SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN RAKYAT dan MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**";

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

- **Rancangan Undang-Undang *carry over*:**
  1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  2. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
  3. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  4. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
  5. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; dan
  6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

- **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

  Sidang yang akan dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:

1. OECD Parliamentary Meeting di Paris, Perancis (5-7 Februari 2025);
2. Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting di Manila, Filipina (5-7 Februari 2025);
3. Parliamentary Hearing at the United Nations, di New York, Amerika Serikat. (13-14 Februari 2015);
4. Munich Security Conference di Munich, Jerman (13-16 Februari 2025);
5. Executive Council Meeting and the 15th Plenary Session of the APA di Baku, Azerbaijan (17-21 Februari 2025);
6. 54th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO di Brussels, Belgia (20 Februari 2025);
7. Parliamentary Meeting and side event on the occasion of the Commission on the Status of Women (CSW) di New York, Amerika Serikat (11 Maret 2025);

8. 1st Global Conference of Women Parliamentarians di Mexico (13-15 Maret 2025);
9. 150th IPU Assembly Meeting di Tashkent, Uzbekistan (5-9 April 2025).